



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG	: EKSEKUTIF		
LEMBAGA	: KEMENTERIAN PERTANIAN		
UNIT KERJA	: DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
I. DATA PRIBADI			
1. Nama	: TRI HARSI		
2. Jabatan	: KEPALA BALAI		
3. NHK	: 101974		
II. DATA HARTA			
A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.505.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/22 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI	Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/30 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI	Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI	Rp. 1.005.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	200.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 20GA Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	----
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	120.331.288
F. HARTA LAINNYA		Rp.	79.500.000
Sub Total		Rp.	1.904.831.288
III. HUTANG		Rp.	12.825.996
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.892.005.292

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.